



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2023-2026



**BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH DIY**

**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Strategis (renstra) Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disusun. Rancangan Akhir Renstra Biro disusun dengan mendasarkan pada Tugas dan fungsi biro serta Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Akhir Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Semoga ke depan dokumen Rancangan Akhir Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY yang sudah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Maret 2022

KEPALA
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA
SEKRETARIAT DAERAH DIY

YUNA PANCAWATI, S.E., M.Si.
NIP. 196606041993032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	2
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	4
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	1
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota.....	13
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Rendah Karbon.....	14
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	15
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	18
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	18
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	1
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	1
BAB 8 PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Distribusi Pegawai Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY	2
Tabel 2-2	Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY	3
Tabel 2-3	Data Aset Tetap Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	4
Tabel 2-4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	13
Tabel 2-5	Anggaran dan Realisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2018-2022	13
Tabel 3-1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	2
Tabel 4-1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	20
Tabel 5-1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	8
Tabel 6-1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	6.2
Tabel 7-1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD . . .	3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Struktur Organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA.....	2
Gambar 5-1 Matrik Analisis Lingkungan Strategis.....	4

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan tujuan pembangunan.

Tahun 2022 adalah tahun berakhirnya RPJMD DIY 2017-2022 dimana pengganti RPJMD adalah Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. RPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun. Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Renstra Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif dan sebagai acuan penyusunan rencana kerja (renja) Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dokumen RPD menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, RPD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penyusunan Renstra OPD Tahun 2023-2026 juga sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dalam penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan pada renstra OPD Tahun 2023-2026 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan secara umum masih banyak banyak hal yang menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan secara lebih baik, diantaranya masih terdapatnya kinerja perencanaan pembangunan yang masih menunjukkan kinerja menurun dan perlu peningkatan kinerja secara lebih baik ke depan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah terkait aspek ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Terjadinya ketimpangan kinerja pembangunan ekonomi baik antar sektor maupun antar wilayah berdampak pada kinerja kesejahteraan yang juga terlihat timpang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dihipotesiskan juga bagi sektor yang kurang berkembang akan berdampak pada kesejahteraan yang relatif rendah bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Kesenjangan antar sektor dan antar wilayah yang cenderung melebar ini merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Ketimpangan antar wilayah ini terutama pada wilayah selatan DIY. Wilayah di selatan DIY cenderung lebih lambat pertumbuhan ekonominya jika dibandingkan dengan wilayah utara DIY. Oleh karena itu pembangunan di wilayah selatan di prioritaskan untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut yang harapannya dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah.

Terkait dengan latar belakang tersebut di atas, serta dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta maka keberadaan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai tugas dan fungsinya perlu menempatkan perannya dalam mewujudkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunannya. Untuk itu perlu disusun dokumen rencana kerja operasional, berupa Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam selama 4 (empat) tahun ke depan dari tahun 2023 sampai dengan 2026, yang juga merupakan penjabaran dalam pelaksanaan arah kebijakan perekonomian dan sumber daya alam dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan atau renja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2017-2022 Perubahan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
- e. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

- k. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- m. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026
- n. Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 050/0110 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dengan yang termaktub dalam RPD DIY dan keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam RKPD, KUA-PPA dan APBD 2023-2026 oleh Pemerintah Daerah DIY.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dalam pelaksanaan perekonomian dan sumber daya alam urusan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan visi Pembangunan dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan RPD DIY Tahun 2023-2026.
- b. Sebagai instrumen memudahkan bagi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- c. Sebagai pedoman merumuskan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan perekonomian daerah.

- d. Sebagai pedoman untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Rendah Karbon
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, indikator kinerja serta pagu indikatif

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPD DIY Tahun 2023-2026

BAB 8 PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah maka Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

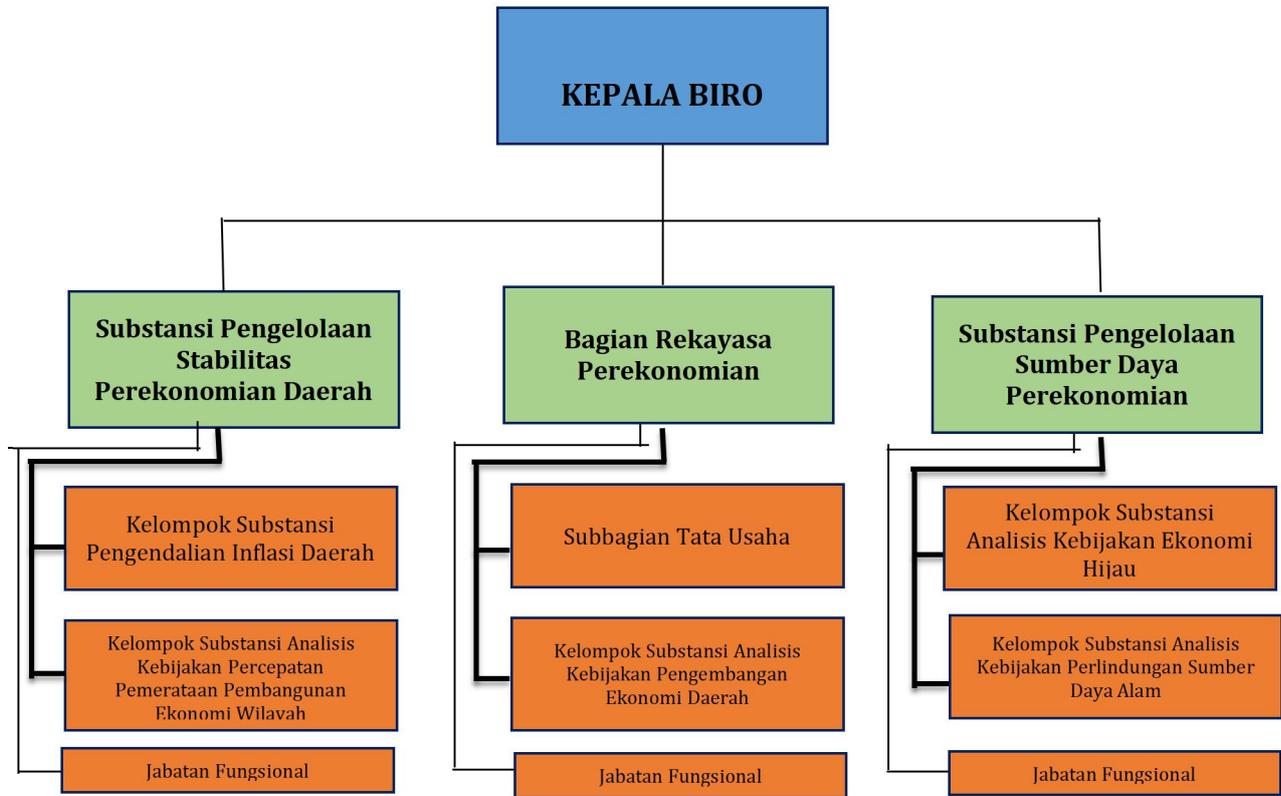
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
- c. Koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan stabilitas perekonomian, rekayasa perekonomian, dan pengelolaan sumber daya perekonomian;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

Struktur organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:

1. Substansi Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah.
2. Bagian Rekayasa Perekonomian terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
3. Substansi Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Ekonomi Hijau; dan

- b. Kelompok Substansi Analisis Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam;
4. Jabatan Fungsional.



Gambar 2- 1 Struktur Organisasi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Keadaan Pegawai

Komposisi Pegawai di lingkungan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- a) Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Tabel 2- 1 Distribusi Pegawai Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY

Bidang/ Unit	Jumlah Pegawai
Kepala Biro	1
Kepala Bagian Rekayasa Perekonomian	1
Subbag Tata Usaha	15
Kelompok Substansi Analisa Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	3

Bidang/ Unit	Jumlah Pegawai
Substansi Pengelolaan Sumber Daya Perekonomian	1
Kelompok Substansi Analisa Kebijakan Ekonomi Hijau	2
Kelompok Substansi Analisa Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam	3
Substansi Pengelolaan Stabilitas Perekonomian Daerah	1
Kelompok Substansi Analisa Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	4
Kelompok Substansi Pengendalian Inflasi Daerah	4
Jumlah total	35

b) Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2- 2 Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY

No	Tingkat pendidikan	Tahun 2020	
		Jumlah (orang)	%
1.	Sarjana Srata 3 (S3)	-	-
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	15	42,86
3.	Sarjana Strata 1 (S1)	11	31,43
4.	Sarjana Muda / Diploma	2	5,71
5.	SLTA sederajat	7	20,00
6.	SLTP sederajat	0	0
7.	Sekolah Dasar (SD)	0	0
Jumlah		35	100

c) Keadaan sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan data aset tetap, aset lancar dan aset lainnya pada tahun 2021 adalah senilai Rp. 499.758.155,75, - dengan garis besar rincian :

Tabel 2-3 Data Aset Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Uraian	2020	2021
ASET	499.758.155,75	569.845.853,02
Aset Lancar	7.275.000,00	13.674.000,00
Persediaan	7.275.000,00	13.674.000,00
Aset Tetap	489.109.093,75	389.726.853,02
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	2.133.111.683,00	2.220.608.683,00
Gedung dan Bangunan	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	22.139.000,00	23.439.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(1.666.141.589,25)	(1.854.320.829,98)
Aset Lainnya	3.374.062,00	166.445.000,00
Aset Tidak Berwujud	3.250.000,00	166.445.000,00
Aset Lain-lain	124.062,00	0,00

Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain :

- a. Kendaraan roda 4 : 4 unit
- b. Kendaraan roda 2 : 2 unit
- c. Komputer yang dapat digunakan : 16 buah
- d. Laptop yang dapat digunakan : 9 buah
- e. Printer yang dapat digunakan : 15 buah
- f. LCD Viewer portable : 3 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, pokok, dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY adalah melaksanakan fungsi pendukung perumusan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melalui kegiatan kajian/analisis, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan wilayah yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan mendorong sektor pariwisata, investasi usaha-usaha ekonomi yang produktif, koperasi dan UKM, industri dan perdagangan, ekonomi kreatif, kelautan dan perikanan serta pertanian sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban sehingga secara bertahap pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan

ketimpangan wilayah dapat tercapai untuk mendukung peningkatan derajat ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian green ekonomi yang berkelanjutan, dengan berlandaskan kekuatan ekonomi lokal, bahan baku lokal berbasis budaya.

Kegiatan tersebut didahului dengan pengumpulan data permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan perekonomian dan sumber daya alam dengan mempergunakan alat melalui kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kondisi riil pembangunan dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan akan berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan besarnya tantangan yang dihadapi akibat keadaan global, sehingga perlu tanggapan yang cepat dan akurat terhadap permasalahan dan solusi yang diperlukan.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Renstra Sebelumnya

Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY tahun 2017-2022, diuraikan sesuai Tabel 2-4 tentang Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tahun 2017-2022. Berdasarkan sasaran RPJMD DIY tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY mempunyai sasaran Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun $n+1$.

Target capaian untuk Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun $n+1$ pada tahun 1 atau tahun 2018 sebesar 80%, target pada tahun ke 2 atau tahun 2019 sebesar 85%, target tahun ke 3 atau tahun 2020 sebesar 90%, target tahun ke 4 atau tahun 2021 sebesar 95% dan target tahun ke 5 atau tahun 2022 sebesar 100%. Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun $n+1$ dapat berupa regulasi daerah baik itu Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan, Surat Edaran, Telaah Staf dan Nota Dinas.

Pada tahun 1 atau tahun 2018 target capaian indikator sasaran sebesar 80%, dan terealisasi 100%. Target kinerja pada tahun 2018 adalah 80% rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun $n+1$. Target kinerja pada tahun 2018 adalah menghasilkan 6 rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun $n+1$ dan terealisasi sebanyak 6 rumusan kebijakan yang berarti capaian adalah sebesar

100% (melebihi target tahun 2018). Adapun 6 rumusan kebijakan yang berbentuk rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekomendasi Penyusunan Kebijakan *Green Economic*
2. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah
3. Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah
4. Rekomendasi Kebijakan Akselerasi Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY
5. Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan
6. Rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan wilayah tertinggal

Dari 6 (enam) bahan rumusan kebijakan tersebut dihasilkan dokumen Roadmap Kebijakan Strategis Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2025 berupa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 254/KEP/2018 dan 5 rekomendasi kebijakan sebagai pedoman bagi SOPD yang teknis dalam pengambilan Kebijakan Operasional.

Pada tahun ke 2 atau tahun 2019 target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 85% dan terealisasi 117,65%. Untuk mendukung pencapaian target kinerja kebijakan pada tahun 2019 sebagai satu mata rantai untuk mewujudkan target akhir Renstra sebagai salah satu pendukung tercapainya target RPJMD 2017-2022, telah dilakukan 3 (tiga) program dengan 6 kegiatan serta menghasilkan 1 (satu) Rencana Aksi (Rencana Aksi Green Economic), 3 (tiga) bahan kebijakan (Kebijakan Perlindungan SDA, Kebijakan Pembangunan Wilayah Tertinggal, Kebijakan Kemudahan Investasi Dan Perijinan Berusaha), dan 6 rekomendasi kebijakan (rekomendasi pengendalian inflasi daerah, rekomendasi percepatan pemerataan pembangunan ekonomi wilayah, rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan, rekomendasi pengembangan ekonomi daerah, rekomendasi percepatan pembangunan daerah, dan rekomendasi kebijakan akselerasi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan DIY). Adapun hasil capaian sebagai berikut:

1. Tersusunnya Peraturan Daerah DIY nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-2039 Tanggal 30 September 2019
2. Tersusunnya Peraturan Gubernur DIY nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 25 November 2019
3. Tersusunnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 - 2021 Tanggal 14 Januari 2019
4. Telaah Staf Inisiasi Stasiun Pangan Jogja Nomor 510/5690 Tanggal 14 Mei 2019
5. Nota Dinas Efektivitas Tata Niaga Pangan untuk Mendukung Optimalisasi Pengendalian Inflasi Nomor 510/03709 tanggal 5 November 2019

6. Telaah Staf Sewa Menyewa Kawasan Industri Piyungan Nomor 530/00742 tanggal 11 Maret 2019
7. Nota Dinas Rekomendasi Hasil Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Nomor: 900/04388 tanggal 31 Desember 2019
8. Nota Dinas Tindak Lanjut Perjanjian Kerja sama antara KADIN, UGM dan Pemda DIY nomor: 510/00682 tanggal 4 Maret 2019
9. Nota Dinas Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Tentang Kerjasama Optimalisasi Tiga Pilar Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY antara KADIN, UGM dan Pemda DIY nomor: 510/03587 tanggal 28 Oktober 2019
10. Nota Dinas Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Akselerasi Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY Nomor: 556/04367 tanggal 31 Desember 2019
11. Nota Dinas Hasil Rapat Koordinasi dengan Badan Ekonomi Kreatif RI dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif nomor 500/02338 tanggal 2 Agustus 2019
12. Nota Dinas Hasil Rapat Koordinasi Ekonomi Kreatif terkait Pembentukan Komisi Film Daerah (KFD) DIY nomor 500/02619 tanggal 22 Agustus 2019
13. Nota Dinas Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Tenaga Kerja di Wilayah Tertinggal DIY Nomor:560/04361 tanggal 30 Desember 2019
14. Nota Dinas Rekomendasi Kebijakan Kemudahan Investasi dan Perizinan Berusaha nomor 570/04363 tanggal 30 Desember 2019
15. Nota Dinas Hasil Koordinasi dengan OPD terkait permohonan Penetapan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah DIY Nomor:529/01079 tanggal 9 April 2019
16. Nota Dinas Terkait Keadaan Perbenihan dan Keberadaan Jogja Benih di DIY nomor 520/03661 tanggal 31 Oktober 2019
17. Telaah Staf tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Gumuk pasir di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Bantul nomor 528/01549 tanggal 22 Mei 2019
18. Nota Dinas Pengembangan Garam rakyat di DIY Nomor 528/04252 tanggal 17 Desember 2019
19. Nota Dinas Laporan Penyelenggaraan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Semester II Tahun 2018 di DIY Nomor: 581/00851 Tanggal 19 Maret 2019
20. Nota Dinas Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perkembangan Transmigrasi di DIY Nomor: 560/00978 tanggal 29 Maret 2019
21. Nota Kesepakatan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Daerah DIY tentang sinergitas dalam dukungan pencegahan dan penegakan kemitraan di DIY Nomor 12/KPPU/NK/IX/2019 ---119/03099/2019 Tanggal 23 September 2019.

Pada tahun ke 3 atau tahun 2020 target capaian indikator sasaran tahun 2020 sebesar 90% dan terealisasi 105%. Pada tahun 2020, adanya pandemi covid-19 menyebabkan adanya kebijakan refocusing anggaran, dimana anggaran dialihkan untuk kegiatan penanggulangan covid-19. Meskipun terjadi refocusing anggaran, namun Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY tetap berupaya agar kinerja dapat tetap tercapai. Adapun hasil capaian kinerja (kebijakan baik berupa Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Instruksi Gubernur, Telaah staf, Nota Dinas) pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah
 - a. Peraturan Gubernur DIY nomor 71 Tahun 2020 tentang Pengelolaan TataNiaga Pangan Lokal
 - b. SE Gubernur DIY nomor 500/6349 tanggal 14 April 2020 tentang Menjaga Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Arus Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya Serta Penggunaan Produk UMKM DIY
 - c. Instruksi Gubernur DIY tentang Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Nomor: 5/INSTR/2020 tanggal 4 Desember 2020
2. Rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi daerah
 - a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
 - b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Lingkungan Pemda DIY Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkup Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 Tentang Penetapan Desa/kalurahan Mandiri Budaya
 - d. Keputusan Gubernur DIY Nomor 129/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Monitoring Evaluasi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
 - e. Keputusan Gubernur DIY Nomor 1/TIM/2020 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan
 - f. Keputusan Gubernur DIY Nomor 12/TIM/2020 tentang *Project Management Unit* Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan
 - g. SE Gubernur DIY Nomor 443/7130 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus Berupa Pengurangan atau Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Pelaku Usaha
3. Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah
 - a. SE Gubernur DIY tentang GREAT SALE JOGJA HEBOH 2020 Nomor 510/1113 tanggal 22 Januari 2020

- b. SK Penugasan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 267/KEP/2020 tanggal 10 September 2020
 - c. Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan Tim Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia Nomor: 13/TIM/2020 tanggal 30 Januari 2020
 - d. Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Nomor: 69/TIM/2020 tanggal 22 Mei 2020
 - e. Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 900/14090 Tanggal 15 September 2020 tentang Optimalisasi Program *One Student One Account (OSOA)*
4. Rekomendasi Analisis strategi pemasaran produk desa melalui bumdes
- a. Nota Dinas Laporan Hasil Penyusunan Kajian Analisis Strategi Pemasaran Produk Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nomor 593/02079 tanggal 6 November 2020
5. Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- a. Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 530/187681 tanggal 26 November 2020 tentang Roadmap Pengembangan Usaha Garam Rakyat di DIY
 - b. Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 541/18518 tanggal 23 November 2020 tentang Usulan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2021
6. Rekomendasi *green economic*
- a. Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 520/17798 tanggal 10 November 2020 tentang Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Hijau di DIY di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Dokumen Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terkait pengembangan ekonomi daerah:

- a. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tentang Penerbitan dan Pemanfaatan Kartu Tani di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/01204/2020 --- B.683-DIR/BPM/04/2020 tanggal 29 April 2020
- b. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dengan UGM dan KADIN DIYNomor 119/8154/2020, Nomor1938/UNI/DUI/DIT/PUI/HK/2020 dan Nomor314/KS/KADIN/DIY/2020 tentang Kerjasama Pengembangan SDM, Teknologi dan Pemasaran Produk UKM Siap Ekspor tanggal 28 Mei 2020
- c. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta tentang Penebusan Pupuk

Bersubsidi Dengan Menggunakan Kartu Tani di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/8404/2020 --- B.13/KW-VII/KKI/06/2020 tanggal 4 Juni 2020

- d. Rencana Kerja antara Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan Pemerintah Daerah DIY tentang Dukungan Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan di Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 16/SJ/PKS/VII/2020---119/10315 tanggal 9 Juli 2020
- e. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Dan Peningkatan Daya Saing Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/14053/2020 ---22/1/Yk/NK/B tanggal 14 September 2020
- f. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan Dan Peningkatan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/14056/2020 ---WYK/1/0021/Rtanggal 14 September 2020
- g. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta Tentang Kerja Sama Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/14055/2020 ---22/KW-VII/KKI/09/2020 tanggal 14 September 2020
- h. Kesepakatan Bersama antara PT. Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan Pemda DIY Nomor 92/FKN/MOU/XI/2020 dan nomor 119/17623/2020 tentang Peningkatan Kinerja Perekonomian daerah melalui Inovasi Teknologi Digital tanggal 8 November 2020.

Pada tahun ke 4 atau tahun 2021 target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 95% dan terealisasi 100%. Pada tahun 2021, adanya pandemi covid-19 menyebabkan adanya kebijakan refocusing anggaran, dimana anggaran dialihkan untuk kegiatan penanggulangan covid-19. Meskipun terjadi refocusing anggaran, namun Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY tetap berupaya agar kinerja dapat tetap tercapai. Adapun hasil capaian kinerja (kebijakan baik berupa Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Instruksi Gubernur, Telaah staf, Nota Dinas) pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah:

- a. Surat Edaran tentang Penyerapan Dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Nomor: 510/3074 Tanggal: 17 Februari 2021. Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi. Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan lokal dengan harga wajar terutama saat terjadi kelebihan hasil produksi yang

menyebabkan harga anjlok. Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari Pergub DIY nomor 71 tahun 2020 tentang pengelolaan tata niaga pangan lokal.

- b. Surat Edaran tentang Implementasi Program Beras ASN. Hal ini sebagai implementasi Penyerapan dan Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal dalam rangka mendukung stabilitas inflasi.
- c. Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah DIY dan Bank Indonesia tentang Pendataan, Pengembangan Sistem Ekonomi Hub (Pusat) dan Pengembangan Sektor Riil Perekonomian DIY

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah:

- a. Nota Dinas Hasil Koordinasi tentang perpanjangan relaksasi dari lembaga keuangan kepada industri pariwisata
- b. Nota Dinas Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Bapak Gubernur DIY tentang Pelaksanaan Desa Mandiri Budaya
- c. Surat Gubernur DIY Nomor 556/6650 tanggal 5 April 2021 Kepada Bupati/Walikota se-DIY perihal Pemberian Stimulus/Insentif berupa Penghapusan /Keringanan atas Pajak dan Retribusi Daerah bagi Pelaku Usaha Industri Pariwisata DIY
- d. Surat Edaran Gubernur tentang Gerakan Berwisata Aman dan Sehat dalam Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Industri Pariwisata DIY
- e. Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) tentang Pengembangan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- f. Nota Dinas Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta
- g. Nota dinas tentang Hasil Koordinasi Pembahasan Usulan Program Prioritas Pembangunan Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul
- h. Nota Dinas tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Progress Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY pada Kawasan Sumbu Filosofi dan Kawasan Pantai Selatan DIY
- i. Keputusan Gubernur DIY Nomor 383/KEP/2021 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021
- j. Nota Dinas Terkait Pelaksanaan Masterplan Jogja Smart Province (JSP) Untuk Mendukung Program Prioritas Pembangunan DIY
- k. Nota Dinas perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2021
- l. Nota Dinas tentang Arah Kebijakan Perekonomian Tahun 2023

Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah:

- a. Nota Dinas Percepatan Akses Keuangan Daerah

- b. Surat Pilot Project Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY 2021 sebagai tindak lanjut dalam program simpanan pelajar (simpler)
- Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam Berkelanjutan berupa nota dinas evaluasi roadmap pengembangan usaha garam di DIY.

Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Hijau:

- a. Nota Dinas tentang Potensi Ekspor Produk Pertanian DIY
- b. Nota Dinas tentang Percepatan Ekspor Produk Pertanian di DIY
- c. Nota Dinas tentang Kajian Penyusunan Valuasi Jasa Lingkungan Sektor Utama Pendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi
- d. Nota Dinas tentang Kajian Pengelolaan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Pada Sosial Budaya dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Kawasan Pesisir Pantai Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul

Tabel 2-4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

No	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Formulasi Indikator)	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Persentase Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	Persentase Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan dan Hasil Evaluasi menjadi Rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan tahun n+1	80%	85%	90%	95%	100%	100%	117,65 %	105%	100%	n.a	125%	138,41 %	116,67 %	105%	n.a

Tabel 2-5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak langsung	2.293.558.268	2.538.174.487	2.413.679.115	n.a.	n.a.	2.271.934.163	2.305.449.800	2.308.065.119	n.a.	n.a.	99,06%	90,83%	95,62%	n.a.	n.a.	-	-
Belanja langsung	2.384.916.250	3.121.404.820	1.453.941.840	n.a.	n.a.	2.259.234.249	2.934.063.354	1.219.756.725	n.a.	n.a.	94,73%	94,00%	83,89%	n.a.	n.a.	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	318.625.600	331.514.720	391.920.000	n.a.	n.a.	296.888.900	304.933.991	207.755.250	n.a.	n.a.	93,18%	91,98%	53,01%	n.a.	n.a.	-	-
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	64.226.000	82.945.000	110.528.000	n.a.	n.a.	63.009.600	74.564.600	106.637.600	n.a.	n.a.	98,11%	89,90%	96,48%	n.a.	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	66.399.600	74.307.220	42.000.000	n.a.	n.a.	45.889.800	67.993.000	38.020.000	n.a.	n.a.	69,11%	91,50%	90,52%	n.a.	n.a.	-	-
Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	188.000.000	174.262.500	239.392.000	n.a.	n.a.	187.989.500	162.376.391	63.097.650	n.a.	n.a.	99,99%	93,18%	26,36%	n.a.	n.a.	-	-
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	95.622.500	135.520.000	253.456.000	n.a.	n.a.	90.797.500	129.612.819	240.370.000	n.a.	n.a.	94,95%	95,64%	94,84%	n.a.	n.a.	-	-
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	-	28.000.000	145.761.000	n.a.	n.a.	-	27.500.000	132.675.000	n.a.	n.a.	-	98,21%	91,02%	n.a.	n.a.	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	16.500.000	25.850.000	18.000.000	n.a.	n.a.	16.135.000	20.625.000	18.000.000	n.a.	n.a.	97,79%	79,79%	100,00%	n.a.	n.a.	-	-
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	79.122.500	81.670.000	89.695.000	n.a.	n.a.	74.662.500	81.487.819	89.695.000	n.a.	n.a.	94,36%	99,78%	100,00%	n.a.	n.a.	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	21.996.650	33.832.000	41.410.000	n.a.	n.a.	20.948.650	33.831.900	41.033.975	n.a.	n.a.	95,24%	100,00%	99,09%	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3.623.825	1.320.000	1.860.000	n.a.	n.a.	3.623.825	1.320.000	1.860.000	n.a.	n.a.	100,00%	100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Laporan	4.939.825	3.600.000	3.984.000	n.a.	n.a.	4.939.825	3.600.000	3.984.000	n.a.	n.a.	100,00	100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Keuangan SKPD											%						
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	10.959.000	25.137.000	31.662.000	n.a.	n.a.	9.911.000	25.136.900	31.285.975	n.a.	n.a.	90,44%	100,00%	98,81%	n.a.	n.a.	-	-
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	2.474.000	3.775.000	3.904.000	n.a.	n.a.	2.474.000	3.775.000	3.904.000	n.a.	n.a.	100,00%	100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	-	-
Program Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	353.579.400	810.094.660	341.754.340	n.a.	n.a.	349.522.500	791.674.250	307.196.000	n.a.	n.a.	98,85%	97,73%	89,89%	n.a.	n.a.	-	-
Pengendalian Inflasi Daerah	353.579.400	514.297.160	251.407.340	n.a.	n.a.	349.522.500	509.953.500	239.627.000	n.a.	n.a.	98,85%	99,16%	95,31%	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah	-	295.797.500	90.347.000	n.a.	n.a.	-	281.720.750	67.569.000	n.a.	n.a.	-	95,24%	74,79%	n.a.	n.a.	-	-
Program Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	1.399.432.600	1.573.443.440	388.296.500	n.a.	n.a.	1.305.527.487	1.465.285.314	386.296.500	n.a.	n.a.	93,29%	93,13%	99,48%	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Kebijakan Pengembangan	1.195.843.000	1.414.993.220	388.296.500	n.a.	n.a.	1.103.576.5	1.320.044.511	386.296.500	n.a.	n.a.	92,28%	93,29%	99,48%	n.a.	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Ekonomi Daerah						49											
Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	203.589.600	158.450.220	n.a.	n.a.	n.a.	201.950.938	145.240.803	n.a.	n.a.	n.a.	99,20%	91,66%	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber daya Daerah Perekonomian	195.659.500	237.000.000	37.105.000	n.a.	n.a.	195.549.212	208.725.080	37.105.000	n.a.	n.a.	99,94%	88,07%	100,00%	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Kebijakan <i>Green Economic</i>	195.659.500	156.870.000	20.982.000	n.a.	n.a.	195.549.212	135.001.000	20.982.000	n.a.	n.a.	99,94%	86,06%	100,00%	n.a.	n.a.	-	-
Penyusunan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	-	80.130.000	16.123.000	n.a.	n.a.	-	73.724.080	16.123.000	n.a.	n.a.	-	92,01%	100,00%	n.a.	n.a.	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	n.a.	n.a.	n.a.	5.138.320.388	387.042.000	n.a.	n.a.	n.a.	4.931.783.622	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	95,98%	n.a.	-	-
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n.a.	n.a.	n.a.	15.977.000	34.062.000	n.a.	n.a.	n.a.	14.957.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	93,62%	n.a.	-	-
Subkegiatan Penyusunan Dokumen	n.a.	n.a.	n.a.		28.376.00	n.a.	n.a.	n.a.	9.193.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,01%	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan Perangkat Daerah				10.213.000	0				000								
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	n.a.	n.a.	n.a.	-	1.996.000	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	-
Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n.a.	n.a.	n.a.	5.764.000	3.690.000	n.a.	n.a.	n.a.	5.764.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,00%	n.a.	-	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n.a.	n.a.	n.a.	4.709.303.388	38.135.000	n.a.	n.a.	n.a.	4.519.071.858	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	95,96%	n.a.	-	-
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	n.a.	n.a.	n.a.	4.668.719.388	-	n.a.	n.a.	n.a.	4.478.487.858	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	95,93%	n.a.	-	-
Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n.a.	n.a.	n.a.	36.600.000	-	n.a.	n.a.	n.a.	36.600.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,00%	n.a.	-	-
Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n.a.	n.a.	n.a.	-	32.760.000	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	-
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan	n.a.	n.a.	n.a.	-		n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.218.000												
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	n.a.	n.a.	n.a.	3.984.000	3.157.000	n.a.	n.a.	n.a.	3.984.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,00%	n.a.	-	-
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n.a.	n.a.	n.a.	-	9.600.000	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	-
Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n.a.	n.a.	n.a.	-	9.600.000	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n.a.	n.a.	n.a.	182.570.000	191.245.000	n.a.	n.a.	n.a.	169.201.464	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,68%	n.a.	-	-
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	n.a.	n.a.	n.a.	2.444.000	2.350.000	n.a.	n.a.	n.a.	2.444.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,00%	n.a.	-	-
Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	n.a.	n.a.	n.a.	-	20.674.000	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n.a.	n.a.	n.a.	6.930.000	8.603.000	n.a.	n.a.	n.a.	6.930.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,00%	n.a.	-	-
Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	n.a.	n.a.	n.a.	22.160.000	22.160.000	n.a.	n.a.	n.a.	22.160.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,00%	n.a.	-	-
Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	n.a.	n.a.	n.a.	8.740.000	8.520.000	n.a.	n.a.	n.a.	7.900.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,39%	n.a.	-	-
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n.a.	n.a.	n.a.	67.296.000	128.938.000	n.a.	n.a.	n.a.	54.767.464	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,38%	n.a.	-	-
Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n.a.	n.a.	n.a.	75.000.000	-	n.a.	n.a.	n.a.	75.000.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,00%	n.a.	-	-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n.a.	n.a.	n.a.	84.500.000	-	n.a.	n.a.	n.a.	84.191.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	99,63%	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n.a.	n.a.	n.a.	47.000.000	-	n.a.	n.a.	n.a.	46.691.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	99,34%	n.a.	-	-
Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n.a.	n.a.	n.a.	37.500.000	-	n.a.	n.a.	n.a.	37.500.000	n.a.				100,00%		-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n.a.	n.a.	n.a.	34.545.000	6.770.000	n.a.	n.a.	n.a.	34.545.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,00%	n.a.	-	-
subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n.a.	n.a.	n.a.	34.545.000	3.170.000	n.a.	n.a.	n.a.	34.545.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,00%	n.a.	-	-
subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	n.a.	n.a.	n.a.	-	3.600.000	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n.a.	n.a.	n.a.	111.425.000	107.230.000	n.a.	n.a.	n.a.	109.817.300	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	98,56%	n.a.	-	-
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	n.a.	n.a.	n.a.	25.730.000	23.430.000	n.a.	n.a.	n.a.	25.321	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	98,41%	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0				.300								
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n.a.	n.a.	n.a.	67.945.000	64.445.000	n.a.	n.a.	n.a.	66.746.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	98,24%	n.a.	-	-
Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	n.a.	n.a.	n.a.	-	1.645.000	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	-
Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n.a.	n.a.	n.a.	17.750.000	12.830.000	n.a.	n.a.	n.a.	17.750.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100,00%	n.a.	-	-
Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n.a.	n.a.	n.a.	-	4.880.000	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-	-
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	n.a.	n.a.	n.a.	3.131.425.000	3.702.784.550	n.a.	n.a.	n.a.	2.732.472.400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	87,26%	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	n.a.	n.a.	n.a.	1.691.238.000	1.411.052.000	n.a.	n.a.	n.a.	1.500.670.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,73%	n.a.	-	-
Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	n.a.	n.a.	n.a.	1.454.247.500	1.032.537.000	n.a.	n.a.	n.a.	1.308.622.500	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	89,99%	n.a.	-	-
Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	n.a.	n.a.	n.a.	236.990.500	378.515.000	n.a.	n.a.	n.a.	192.047.500	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,04%	n.a.	-	-
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	n.a.	n.a.	n.a.	1.070.430.000	2.119.718.550	n.a.	n.a.	n.a.	923.346.400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	86,26%	n.a.	-	-
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	n.a.	n.a.	n.a.	1.070.430.000	2.119.718.550	n.a.	n.a.	n.a.	923.346.400	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	86,26%	n.a.	-	-
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	n.a.	n.a.	n.a.	369.757.000	172.014.000	n.a.	n.a.	n.a.	308.456.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,42%	n.a.	-	-

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	n.a.	n.a.	n.a.	369.757.00 0	172.014.0 00	n.a.	n.a.	n.a.	308.45 6.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,42%	n.a.	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan DIY adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.

Pandemi *coronavirus disease2019* (covid-19) mempunyai implikasi besar bagi perekonomian. Untuk mencegah penyebaran covid-19, Pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* dan menganjurkan masyarakat agar *stay at home*. Tentunya ini berdampak pada sektor perekonomian karena terimbas oleh kebijakan ini. Sektor perekonomian terdampak covid-19 di DIY antara lain sektor Pariwisata, Industri, Investasi dan Tenaga Kerja. Pelemahan perekonomian berdampak ke rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Tantangan yang dihadapi oleh Biro Administrasi Perekonomian dan SDA dalam dalam mencapai tujuan dan sasaran serta tantangan terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 antara lain:

1. Menjaga ketersediaan stok pangan
2. Menjaga harga pangan stabil (tidak ada gejolak harga)
3. Pemberian stimulus ekonomi dan dispensasi oleh Pemerintah Daerah bagi para pelaku usaha.
4. Pemulihan aktivitas perekonomian di sektor pariwisata.
5. Pemulihan investasi di DIY.
6. Sektor Korporasi terganggu aktivitas ekonominya, yang paling rentan yaitu sektor *manufaktur*, perdagangan, transportasi dan akomodasi (restoran dan perhotelan).
7. Ketimpangan pendapatan antara wilayah Utara dan Selatan sehingga menimbulkan kemiskinan di wilayah Selatan.
8. Keterkaitan dan kesepadanan (*link dan match*) antara tenaga kerja dengan dunia usaha
9. Belum terimplementasinya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021

10. Konsep-konsep implementasi *corporate farming* dan *integrated farming* belum dijabarkan dalam program dan kegiatan organisasi perangkat daerah terkait;
11. Perlu adanya penguatan kelembagaan koperasi simpan pinjam untuk mendukung usaha kecil dan mikro dalam kemudahan akses permodalan;
12. Perlu adanya dukungan kebijakan usaha kecil dan mikro untuk standarisasi produk yang memiliki daya saing ekspor melalui pengembangan pola inti plasma pada sentra-sentra usaha kecil dan mikro terhadap inti pengusaha menengah.
13. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY sesuai tugas dan fungsinya dalam merespon penanganan dampak covid-19 telah menginisiasi penyusunan Surat Edaran Gubernur DIY kepada Bupati/Walikota di DIY tentang Pemberian Insentif/Stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur DIY nomor 443/7130 tanggal 29 April 2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha. Kebijakan ini dikeluarkan dalam upaya membantu mengurangi beban perusahaan/pelaku usaha dengan pemberian stimulus /insentif baik berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah serta pajak penerangan jalan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dampak covid-19 yang terjadi.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya pasca menyebarnya *coronavirus disease 2019* (covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY menginisiasi terbitnya Surat Edaran Nomor 500/6349 tanggal 14 April 2020 tentang Menjaga Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Arus Distribusi Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya serta Penggunaan Produk UMKM DIY. Dalam Surat Edaran ini ditegaskan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Satgas Pangan DIY, Pelaku Usaha/Pedagang/Distributor/Sub Distributor/ Agen/ Sub Agen/ Pemilik Gudang, Pusat Perbelanjaan, Pasar Modern dan *Minimarket* untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga kestabilan harga dan memastikan terjaminnya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Memastikan dan menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya ke DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dapat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DIY.
3. Para Pelaku Usaha/Pedagang/ Distributor/ Sub Distributor/ Agen/ Sub Agen/ Pemilik Gudang, Pusat Perbelanjaan, Pasar Modern dan *Minimarket* untuk tetap mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan penting lainnya dan tidak menaikkan harga serta tidak melakukan kegiatan penimbunan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dapat bekerjasama dengan Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya penimbunan barang kebutuhan pokok dan penting lainnya.

Selain hal tersebut, dalam memenuhi kebutuhan penanggulangan dampak covid-19 dan upaya pemberdayaan UMKM DIY diharapkan dapat memanfaatkan produk lokal DIY yang diproduksi oleh UMKM DIY.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, beberapa permasalahan yang secara umum dihadapi adalah kendala dalam mewujudkan bahan rumusan kebijakan untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam kebijakan. Dalam rangka mendesain/ merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan publik dan mudah untuk diimplementasikan, maka harus dilakukan analisis kebijakan (*policy analysis*) yang ideal. Untuk memberikan hasil analisis yang tepat, maka lembaga-lembaga pemerintah harus memiliki SDM sebagai analis kebijakan (*policy analyst*) yang profesional dan bermoral tinggi. Sehingga mampu menyediakan berbagai alternatif kebijakan sebelum menetapkan kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Bahan rumusan kebijakan yang dihasilkan harus berkualitas dan memenuhi aspek *timely manner* (tersedia pada saat dibutuhkan).

Merebaknya *coronavirus disease* (covid-19) berdampak pada perekonomian global dan nasional. Tentunya hal ini memerlukan kebijakan yang tepat dalam penanganan dampak perekonomian. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian di berbagai daerah terdampak, begitu juga di DIY. Perekonomian DIY yang sebagian besar digerakkan oleh sektor pariwisata dapat dikatakan sangat terpengaruh. Pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan pertama tahun 2020 tumbuh minus sampai dengan 0,17 persen (*year on year*). Pemerintah harus memikirkan berbagai upaya dalam penanganan covid19 baik dalam masa tanggap darurat dan masa pemulihan (*recovery*). Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2020 tumbuh pada angka minus 2,69 persen. Hal ini tentunya sangat berbeda jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yaitu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 tumbuh sebesar 6,59 persen. Dampak covid-19 terhadap perekonomian DIY cukup besar sehingga Pemerintah Daerah berupaya meredesain program kegiatan untuk pemulihan ekonomi dampak covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik. Pada triwulan III tahun 2021, pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 2,30 persen (*year on year*). Kondisi ini mencerminkan kondisi yang lebih baik jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami

kontraksi sebesar 2,98 persen. Jika dibanding triwulan II-2021 (*q-to-q*) perekonomian DIY mengalami kontraksi sebesar 0,09 persen.

Berbagai dampak yang ditimbulkan dan dirasa cukup berat adalah penurunan penerimaan pajak. Seperti diketahui, pajak memiliki fungsi budgeter, yaitu sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Terganggunya pasokan bahan baku sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi bagi para pelaku usaha. Karena kegiatan produksi menjadi tidak lancar, banyak perusahaan mengalami kesulitan karena berkurangnya pendapatan sehingga tidak mampu membayar para pekerja. Sehingga gelombang PHK tidak bisa dihindari. Akibatnya, banyak orang kesulitan mencari penghasilan, dengan demikian akan mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jika pandemi ini semakin berlarut-larut maka akan semakin mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam menentukan prioritas pembangunan perekonomian, perlu dipetakan permasalahan sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk menentukan prioritas dan sasaran organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap permasalahan terkait tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD. Hasil rumusan permasalahan terkait pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dipetakan menjadi permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

Table 3-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY

No	Akar Masalah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
1.	Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat 2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat covid-19 3. Keterbatasan daya dukung dan daya tampung untuk sektor pertanian, keterbatasan lahan pertanian dan penguasaan lahan yang kecil 4. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Petani 5. Skala usaha nelayan di DIY belum memenuhi standar hidup layak 6. Masyarakat DIY belum mempunyai budaya bahari yang kuat 7. Kurangnya kemampuan usaha para pelaku UMKM 8. Belum semua koperasi memiliki kinerja yang baik 9. Infrastruktur perdagangan belum memadai 10. Jumlah kesempatan kerja lebih kecil daripada angkatan kerja 11. Ketersediaan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
2.	Ketimpangan Antar Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran investasi antar Kabupaten/Kota yang tidak merata 2. Pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga 3. Terbatasnya ketersediaan Bahan baku 4. Rantai pasok dan sistem distribusi produk-produk

		<p>pertanian masih dikuasai oleh kartel-kartel</p> <p>5. Rendahnya fungsi harmonisasi hubungan industrial di DIY</p> <p>12. Rata-rata pengeluaran wisatawan (<i>money spending</i>) masih rendah</p> <p>13. Masih kurangnya destinasi dan produk wisata kelas dunia, <i>event</i> yang menarik secara <i>sustainable</i></p> <p>14. Promosi wisata masih kurang optimal</p> <p>15. Lama tinggal wisatawan yang belum mengalami peningkatan</p> <p>16. Penyelenggaraan perizinan belum optimal</p>
--	--	---

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah, maka dapat diuraikan beberapa akar permasalahannya sebagai berikut:

1. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan *Indeks Williamson* masih tinggi. Pada tahun 2020 nilai *Indeks Williamson* di DIY sebesar 0,453. Ketimpangan antar wilayah disebabkan diantaranya karena adanya kesenjangan *infrastruktur* pendukung antar-wilayah sebagai contoh jika dihubungkan dengan luas wilayahnya Gunungkidul adalah wilayah dengan jaringan jalan paling terbatas. Sebaliknya Kota Yogyakarta memiliki jaringan jalan paling pendek, tetapi dibandingkan luas wilayah menjadi wilayah dengan jaringan jalan paling banyak. Penyebab lain ketimpangan adalah minat investasi antar wilayah yang tidak seimbang. Investasi masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terutama pada sektor tersier dan sekunder. Investasi pada sektor tersebut memberikan bangkitan ekonomi yang cepat sehingga pertumbuhan PDRB di kedua wilayah tersebut jauh di atas tiga Kabupaten lainnya. Maka sudah saatnya pembangunan *infrastruktur* dan investasi diarahkan pada wilayah selatan seperti Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo sehingga mampu menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah yang masih belum berkembang agar adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan *infrastruktur* dasar dan penunjang sehingga usaha dapat berkembang dan penyerapan tenaga kerja meningkat.

2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2021 angka kemiskinan di DIY mencapai 11,91% dan lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Nasional. Tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,71%. Jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa, maka angka kemiskinan di DIY yang paling tinggi. Pada tahun 2021 angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 11,25%, Jawa Timur sebesar 10,59% sedangkan angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya sebesar 4,67%, Jawa Barat sebesar 7,97% dan Banten sebesar 6,50%.

DIY menjadi daerah termiskin di Pulau Jawa disebabkan pendapatan yang diterima masyarakat miskin DIY belum mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup yang layak. Penyebab hal ini karena skala usaha yang dimiliki persektor di wilayah selatan belum mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat secara layak. Disamping itu, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk membuka usaha produktif dan jasa di daerah selatan DIY. Faktor lain yang berpengaruh kepada kemiskinan perlu adanya dukungan kesiapan sumber daya manusia. Rendahnya kualitas SDM di Wilayah DIY bagian Selatan dibanding Wilayah DIY bagian Utara. Penyebabnya karena tingkat pendidikan masih rendah di daerah selatan DIY. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan juga masih cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Gini yang mencapai 0,436 pada tahun 2021. Dengan demikian, untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program-program *afirmatif* dalam rangka peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, beberapa permasalahan sektoral yang dihadapi antara lain:

1. Penanaman Modal dan Perijinan

- a. Belum semua Kab/Kota di DIY memiliki RDTR dikarenakan RDTR ini harus ditetapkan dengan Perda.
- b. Daerah belum mempunyai instrumen sebagai pengendalian izin yang dimohonkan
- c. Sistem pengawasan dalam OSS belum terfasilitasi dengan baik.
- d. Belum memadainya pejabat pengawas/PPNS baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam pengawasan
- e. DPPM Dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang tidak menggunakan konsep pelayanan terpadu satu atap, mengalami kendala dalam melakukan verifikasi segera terhadap permohonan perizinan.
- f. Lahan yang terbatas, kepastian status lahan (mekanisme penguasaan lahan), kesesuaian dengan RDTR (belum semua wilayah ada RDTR nya), harga tanah/lahan (sewa/beli) mahal.
- g. Inisiatif kerjasama dengan pihak luar negeri di bidang perekonomian belum menjadi prioritas dari OPD teknis untuk dilaksanakan.

2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Sebagian besar usaha di sektor pariwisata tutup permanen dan sementara akibat dampak pandemi Covid-19

- b. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata menurun (akibat adanya PHK dan beralih pekerjaan menjadi non pariwisata)
- c. Menurunnya Citra Pariwisata DIY akibat Pandemi Covid-19
- d. Masih banyaknya Destinasi wisata yang perlu reaktivasi kembali akibat dampak pandemi (aspek sosial dan aspek sarana prasarana)
- e. Masih banyaknya pelaku usaha pariwisata yang belum siap untuk menerapkan Quality Tourism
- f. Belum optimalnya Digitalisasi disektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- g. Orientasi dan penerapan Hygiene dalam kegiatan berwisata belum optimal
- h. Wisatawan Domestik mendominasi kunjungan Wisata di DIY
- i. Turunnya keinginan untuk berwisata (rendahnya *Propensity to Travel*) yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19
- j. Belum terintegrasi pengelolaan & pengembangan produk ekraf dengan pengembangan pariwisata
- k. Belum optimalnya penerapan dan standard usaha kuliner yang memenuhi Prokes dan standard hygiyene serta deversifikasi produk

3. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

- a. Masih adanya kesempatan kerja yang tidak terisi karena tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri/pasar kerja.
- b. Masih rendahnya jumlah angkatan kerja yang mempunyai sertifikasi kompetensi
- c. Masih rendahnya minat masyarakat untuk bekerja keluar DIY baik dalam negeri maupun luar negeri
- d. Masih banyaknya Angkatan Kerja berpendidikan rendah (SLTP kebawah)
- e. Terbatasnya lapangan kerja formal
- f. Belum optimalnya peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan sehingga kasus Hubungan Industrial diselesaikan secara LKS Tripartit.
- g. Belum semua perusahaan menerapkan norma K3 dan norma kerja untuk mendorong terwujudnya perusahaan nihil kecelakaan kerja serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

4. Pengendalian Inflasi Daerah

- a. Daya beli yang belum optimal dipengaruhi pandemi Covid-19
- b. Panjangnya rantai perdagangan dan struktur pasar
- c. Komoditas pertanian/hortikultutara dari petani DIY keluar dari DIY

- d. Perekonomian DIY merupakan “perekonomian kerumunan” yang bergantung pada mobilitas dan kegiatan masyarakat pada sektor pariwisata dan pendidikan
- e. Perlunya memunculkan alternatif penggerak perekonomian DIY melalui sektor pertanian, UMKM dll
- f. Data pangan yang belum berkesinambungan dan berkelanjutan
- g. Masih lemahnya kelembagaan petani sehingga nilai tambah pertanian masih rendah
- h. Volatilitas komoditas pangan yang belum stabil
- i. Secara khusus terdapat 3 komoditas utama yaitu cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang menyumbang 77% dari inflasi *volatile food* DIY
- j. Produksi cabai di DIY mayoritas keluar DIY dan harga masih sangat dipengaruhi oleh harga nasional terutama Jakarta
- k. Harga bawang merah di DIY sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga bawang merah di Brebes dan harga bawang merah masih fluktuasi seiring pola tanam.
- l. Permasalahan tata niaga di DIY, seperti DIY merupakan salah satu produsen cabai merah dan cabai rawit di Sleman dan Kulon Progo namun cabai merah dan cabai rawit yang masuk ke pasar di DIY utamanya bersumber dari Wonosobo, Magelang dan Boyolali.
- m. Digitalisasi dan penggunaan teknologi pertanian yang belum optimal
- n. Risiko ketidakpastian perekonomian global masih tinggi dan naiknya harga komoditas global (CPO)
- o. Ekspektasi inflasi meningkat seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.
- p. Risiko kenaikan inflasi tarif angkutan seiring dengan peningkatan mobilitas
- q. Risiko ketersediaan pasokan pangan dalam merespon *recovery* permintaan domestik
- r. Permasalahan pola tanam dan manajemen tata niaga
- s. Gangguan produksi akibat disinsentif petani
- t. Inefisiensi tata niaga pangan.

5. Sektor Pertanian

Produktivitas dan kesuburan tanah menunjukkan kemampuan tanah memproduksi tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Produktivitas merupakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman tanaman. Berdasar pada pengertian tersebut maka produktivitas sektor pertanian DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) menjadi indikator penilaian valuasi jasa lingkungan yang memberi manfaat langsung. Data yang dihimpun pada BPS DIY tahun 2021 (merangkum data produktivitas tahun 2018-2020) menunjukkan terjadi penurunan produktivitas padi dari tahun 2018-2020.

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian adalah luas lahan, kondisi irigasi, tenaga kerja dan alih fungsi lahan. Dengan kondisi tersebut dapat dilihat dari peta penggunaan lahan pertanian (kondisi eksisting). Penggunaan lahan pertanian saat ini akan menjadi penilaian pada rencana pola ruang pertanian di Provinsi DIY.

Selain menyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan di DIY, masalah lain pada sektor pertanian adalah alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi. Alih fungsi lahan pertanian di DIY yang cukup masif menyebabkan jumlah rumah tangga pertanian pemilik lahan berkurang. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 berikut, jumlah rumah tangga usaha pertanian pemilik lahan di DIY pada tahun 2013 mencapai 495.401 dan pada tahun 2018 jumlahnya berkurang menjadi 480.877. Artinya, selama periode tersebut jumlah rumah tangga usaha pertanian pemilik lahan berkurang sebanyak 14.524 atau 2,93 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka Kabupaten Sleman mengalami penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang paling tinggi selama periode tersebut.

6. Sektor Kehutanan

Pada sektor lingkungan hidup, kinerja sektor kehutanan dan indeks kualitas udara menjadi indikator dalam valuasi jasa lingkungan. Kehilangan sumberdaya kehutanan akan berdampak pada berkurangnya fungsi daya serap karbon CO₂. Kehutanan di DIY terbagi ke dalam beberapa klasifikasi yakni hutan lindung, suaka dan pelestarian alam, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi.

Luas hutan di DIY tidak tersebar merata di setiap kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul memiliki hutan yang paling luas, sedangkan Kota Yogyakarta tidak memiliki hutan sama sekali. Luas hutan di Kabupaten Gunungkidul mencapai 15.001,57 hektar atau sekitar 78 persen dari total luas hutan di DIY. Sementara itu, luas hutan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul tidak berbeda jauh. Kabupaten Sleman memiliki hutan seluas 2.051,07 hektar (11 persen), Kabupaten Kulonprogo 1.046,49 hektar (6 persen) dan Kabupaten Bantul 1.035,18 hektar (5 persen). Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo memiliki tiga jenis kawasan hutan sebagaimana disebutkan di atas, Kabupaten Bantul memiliki hutan lindung dan hutan konservasi, Kabupaten Sleman hanya memiliki hutan konservasi saja

Salah satu permasalahan di sektor kehutanan adalah kerusakan hutan. Sebagian besar kerusakan hutan di DIY terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menyebabkan kerugian akibat kerusakan hutan juga paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu perluantisipasi kerugian akibat pencurian kayu, bencana alam serta kebakaran hutan.

Pengelolaan hutan di DIY menjadi referensi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terutama dalam pengelolaan hutan yang melibatkan kearifan lokal.

7. Sektor Energi dan Transportasi

Sektor energi berkaitan erat dengan sektor transportasi, mengingat moda transportasi baik darat, laut maupun udara sama-sama membutuhkan bahan bakar dari berbagai jenis sumber energi untuk beroperasi. Namun, sebenarnya sektor energi tidak hanya berperan pada sektor transportasi saja. Energi juga berperan untuk penerangan rumah tangga dan bahan bakar memasak sehari-hari.

Indikator lingkungan hidup DIY khususnya emisi CO₂ dari penggunaan energi di DIY untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, yang menunjukkan tren yang terus meningkat. Sebagaimana terlihat, emisi CO₂ tumbuh dari 2,80 MT (Juta Ton) CO₂ pada tahun 2015 menjadi 3,20 MT pada tahun 2017. Emisi per kapita tumbuh dari 0,76 Ton CO₂/kapita pada tahun 2015 menjadi 0,85 Ton CO₂/kap pada tahun 2017. Adapun emisi per PDRB tumbuh dari 33,53 Ton CO₂/Milyar Rupiah pada tahun 2015 menjadi 34,44 Ton CO₂/Juta Rupiah pada tahun 2017.

Hubungan panjang jalan dengan konsumsi BBM sangat kuat, ini berarti hubungan masing – masing sangat berpengaruh satu sama lain. Apabila terjadi peningkatan panjang jalan tiap tahun, juga diikuti dengan peningkatan konsumsi BBM tiap tahunnya. Akan tetapi hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap konsumsi BBM jenis solar. Konsumsi solar meningkat tidak dapat dipastikan karena peningkatan panjang jalan. Hal demikian mungkin dapat disebabkan oleh faktor lain, seperti lebih banyaknya jumlah angkutan yang sebagian besar menggunakan solar sebagai bahan bakar, atau solar tidak hanya digunakan untuk kendaraan bermotor saja tetapi juga pada mesin – mesin berbahan bakar solar. Agar konsumsi BBM tetap efisien dapat dianjurkan dengan memilih jarak terpendek dalam perjalanan dan perencanaan jalan dilakukan dengan efisien.

Pertumbuhan volume kendaraan dan jarak masih berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan tren penggunaan moda transportasi saat ini cenderung mengarah pada moda transportasi yang tidak berkelanjutan bagi lingkungan, seperti transportasi darat dan udara (Lorek dan Spangenberg, 2001). Di wilayah perkotaan, transportasi darat umumnya berbahan bakar bensin, diesel atau gas (Liaquat, 2010). Fenomena ini juga terjadi secara umum di Indonesia dan DIY pada khususnya.

8. Sektor Industri

Sektor industri di DIY menghadapi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan agar kontribusi sektor industri terus meningkat. Secara umum, permasalahan yang dihadapi

dalam pembangunan industri di DIY adalah ketersediaan bahan baku industri yang tergantung dari luar daerah; persaingan pada pasar domestik dan internasional yang semakin kompetitif; ketersediaan lahan yang terbatas, belum tersedia daya dukung kawasan industri secara memadai; dan kualitas sumber daya manusia yang belum memenuhi budaya industri yang kompetitif dan inovatif.

Pada periode 2013-2017, meskipun sektor industri masih menjadi sektor yang memiliki kontribusi (share) terbesar dalam pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di DIY, namun ada kecenderungan besarnya kontribusi mengalami penurunan. Subsektor industri yang menyumbang nilai terbesar adalah sektor industri makanan dan minuman; kemudian industri tekstil dan pakaian jadi; industri barang dari logam; dan industri furnitur.

Dari sisi jumlah pelaku usaha, sektor industri di DIY didominasi oleh industri skala mikro dan kecil yang mayoritas bergerak pada industri pengolahan pangan. Sementara itu, pelaku industri skala menengah dan besar mayoritas bergerak pada pengolahan kayu dan pakaian jadi. Pengembangan sektor industri perlu lebih terarah, terintegrasi, dan terukur dalam jangka panjang sehingga sektor industri mampu tumbuh dan berkontribusi besar dalam perekonomian daerah, memerlukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta (RPI DIY). Agar terjadi integrasi dan keselarasan pembangunan industri DIY dengan nasional, maka periode perencanaan pembangunan sektor industri di DIY disusun untuk tahun 2019-2039.

Aktivitas sektor industri di DIY menyumbang emisi gas rumah kaca melalui penggunaan bahan bakar dan proses pengolahan. Pembakaran bahan bakar industri menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 1.189 Gg CO₂e sedangkan proses industri menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 311,58 Gg CO₂e. Emisi ini cukup rendah dibandingkan total emisi gas rumah kaca DIY yang mencapai lebih dari 25.000 Gg CO₂e

9. Sektor Pengolahan Limbah

Sampah mirip dengan limbah karena sama-sama merupakan sisa dari suatu proses kegiatan. Menurut Peraturan Gubernur DIY No. 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat dibedakan berdasarkan jenis dan sifatnya menurut Peraturan Daerah DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu: (a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; (b) sampah yang mudah terurai; (c) sampah yang dapat digunakan kembali; (d) sampah yang dapat didaur ulang; serta

(e) sampah lainnya. Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, Limbah didefinisikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah bisa berbentuk padat maupun cair. Karena sifatnya yang cair, limbah cair bisa mengurangi kualitas air. Agar tidak mencemari lingkungan, maka sampah dan limbah perlu dikelola/ditangani.

Potensi timbulan sampah di DIY terbagi menjadi sampah terkelola dan tidak terkelola. Pada tahun 2019 terdapat 763.101,05 ton sampah di DIY dengan klasifikasi jumlah sampah terkelola pada kategori pengurangan sebesar 187.394,56 ton dan 249.129,23 ton pada kegiatan penanganan. Terjadi peningkatan jumlah sampah pada tahun 2020 menjadi 783.625,45 ton dengan kegiatan pengurangan sebanyak 194.606,80 ton dan kegiatan penanganan sebanyak 226.909,85 ton. Adapun jumlah sampah tidak terkelola sebanyak 362.135,80 ton.

Potensi buangan limbah di DIY pada tahun 2019 mencapai 147.280.368.900 lt/org/tahun dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan potensi buangan limbah menjadi 140.603.655.675 lt/orng/tahun. Potensi buangan limbah tertinggi berada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, dengan potensi buangan limbah sebanyak 103.505.850 liter/org/hari dan 118.209.420 lt/orng/hari pada tahun 2020.

Sektor dalam PDRB yang bisa menggambarkan aktivitas pengelolaan sampah dan limbah adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

10. Akses Keuangan Daerah

Masih rendahnya akses keuangan di daerah yang merupakan salah satu kunci mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan lebih terbukanya akses keuangan bagi masyarakat di daerah maka diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif. Langkah yang perlu dilakukan diantaranya mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah serta mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.

Rendahnya literasi keuangan di masyarakat. Peningkatan akses keuangan yang tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap produk layanan jasa keuangan mengakibatkan masih tingginya risiko bertransaksi keuangan di masyarakat diantaranya pinjaman rentenir dengan bunga besar, penipuan investasi, serta tidak adanya *social safety net* karena kurangnya pemahaman manajemen keuangan. Jika literasi keuangan masih berada di tingkat rendah, maka peningkatan kesejahteraan hidup akan lebih sulit diwujudkan.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mempunyai Visi “Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mendukung Visi Presiden yakni “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut disusun sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan *responsibility* yang disingkat dengan “PIKIR”. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian” yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang ekonomi. Untuk meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasan dari berbagai instansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progres kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan dengan optimal. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik.

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai, apabila pelaksanaan kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang ekonomi mempunyai komitmen yang tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran ekonomi, antara lain difokuskan pada target sasaran makro ekonomi, target sasaran kedaulatan pangan, target sasaran kedaulatan energi, target sasaran pembangunan infrastruktur dan target sasaran ketahanan air.

Selain itu, arah kebijakan Kabupaten/Kota yang terkait dengan Biro Administrasi Perkonomian dan SDA Setda DIY antara lain:

1. Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Penguatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing, sasaran yang ingin dicapai yaitu Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun, pertumbuhan ekonomi meningkat dan investasi meningkat. Untuk mewujudkannya melalui kebijakan antara lain Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro, pengoptimalan kualitas koperasi, Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, Pengembangan dan pemasaran pariwisata, Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif, Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan, Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan serta pengembangan penanaman modal.
2. Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan menurunnya gini ratio, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan. Untuk mewujudkannya, arah kebijakan yang diambil antara lain meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal, Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan, Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal, Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja serta Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Kabupaten Sleman dalam mewujudkan peningkatan pemerataan ekonomi masyarakat, sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi, Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian, Meningkatnya kesempatan kerja, Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dan menurunnya kemiskinan. Untuk mewujudkannya, arah kebijakan yang diambil antara lain Meningkatkan investasi inklusif, Meningkatkan aksesibilitas UMKM, meningkatkan keaktifan koperasi, Meningkatkan pengelolaan destinasi Pariwisata, Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian, Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi produk sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan Pertanian, Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar.
4. Kabupaten Bantul dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sasaran yang ingin dicapai yaitu menurunnya angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas, terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul, terciptanya industri kreatif yang berkualitas, terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat

dan terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat. Untuk mewujudkannya arah kebijakan yang diambil antara lain melalui kebijakan Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, peningkatan iklim dan kualitas pelayanan investasi, pengurangan kesenjangan pendapatan, peningkatan usaha produktif masyarakat yang kompetitif, peningkatan kualitas destinasi pariwisata, peningkatan keragaman destinasi pariwisata, peningkatan kualitas produk, Intensifikasi dan diversifikasi usaha tani, peningkatan kualitas Sumberdaya Peternakan dan Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana perikanan.

5. Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah, sasaran yang ingin dicapai yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan. Untuk mewujudkannya melalui kebijakan pengembangan industri, perdagangan dan koperasi untuk mendukung sektor pariwisata, peningkatan promosi investasi dan optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan agribisnis pertanian, memantapkan cadangan pangan, meningkatkan produksi, stabilisasi pasokan dan akses bahan pangan serta memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat.

Pemerintah Daerah DIY dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka melalui Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan merumuskan program prioritas pembangunan DIY yang ditetapkan dengan SK Gubernur DIY nomor 353/KEP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Infrastruktur Prioritas
 - a. Pembangunan Jalan Temon–Borobudur di Kabupaten Kulon Progo
 - b. Pembangunan Jalan Prambanan Gading di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul
 - c. Pembangunan dan Pengembangan TPA Regional Piyungan di Kabupaten Bantul
 - d. Pembangunan SPAM Regional Kamijoro, SPAM Regional Kartamantul, SPAM Regional dari Bendungan Bener di DIY
 - e. Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo
2. Program Penataan/Pengembangan Kawasan Prioritas
 - a. Penataan Kawasan Kraton di Kota Yogyakarta
 - b. Penataan Kawasan Sumbu Filosofi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul
 - c. Penataan Kawasan Puro Pakualaman di Kota Yogyakarta

- d. Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul
 - e. Pengembangan Kawasan Pantai Samas-Parangtritis di Kabupaten Bantul
 - f. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulonprogo
 - g. Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo
 - h. Pengembangan Kawasan Aerotropolis di Kabupaten Kulon Progo
 - i. Pengembangan Kawasan Stasiun Tugu di Yogyakarta
 - j. Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Merapi di Kabupaten Sleman
3. Program Strategis lainnya yang diprioritaskan
 - a. Pengembangan *Jogjakarta Smart Province* di DIY
 - b. Pengembangan *Jogjakarta Agro Park (JAP)* di Kabupaten Kulon Progo

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Rendah Karbon

Penyusunan RPD DIY 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039. Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal. Arah kebijakan pembangunan sektor strategis DIY diharapkan mampu menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhitungkan dampaknya terhadap perubahan kualitas lingkungan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi hijau.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 5 isu yaitu:

1. Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam
2. Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian
3. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah
4. Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal
5. Angka Kemiskinan Masih Tinggi.

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa ini, kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya:

- 1) mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat

- diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;
- 2) menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan;
 - 3) mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;
 - 4) memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
 - 5) menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 6) memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu; dan mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pada sektor-sektor yang berada di dalam lingkup tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terkait dengan perumusan kebijakan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan sumberdaya perekonomian
 - 1) Percepatan Ekspor Produk Pertanian
 - 2) Pengembangan perbenihan untuk meningkatkan produksi, produktivitas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan.
 - 3) Pemberdayaan dan penguatan lembaga petani, nelayan, peternak, dan pembudidaya ikan.
 - 4) Keterbatasan Kapasitas SDM Pertanian dalam arti luas.
 - 5) Peningkatan NTP pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) belum optimal dikarenakan usaha pertanian dan perikanan yang belum efisien.
 - 6) Belum adanya upaya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik.
 - 7) Ketergantungan masyarakat dalam konsumsi beras cukup tinggi.
 - 8) Kondisi pangan yang beredar di masyarakat masih banyak yang belum terjamin mutu dan keamanannya, antara lain masih beredarnya makanan yang mengandung zat kimia berbahaya.
 - 9) Belum sinergisnya peran lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan.

- 10) Pencemaran, Kerusakan Alam dan Resiko Bencana Alam
 - 11) Penguatan Sektor Produksi berbasis pertanian dan perikanan yang adaptif bagi komunitas usaha tani menghadapi pandemi covid-19
 - 12) Pembentukan Badan Pengelola Dana Abadi Ekonomi Hijau
 - 13) Hilirisasi ke Industri Berbasis Revitalisasi Lahan Pertanian Berkelanjutan
 - 14) Pengembangan Manajemen Rantai Nilai produk pertanian dan perikanan
 - 15) Pengembangan teknologi pertanian dalam arti luas
 - 16) Pengembangan pemasaran hasil pertanian dalam arti luas.
 - 17) Pengembangan pertanian dalam arti luas untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan pendidikan.
 - 18) Penyediaan infrastruktur strategis dan sarana prasarana pendukung pertanian dan perikanan terutama di kawasan pesisir selatan belum optimal.
 - 19) Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan berbasis kawasan sentra produksi
- b) Stabilitas perekonomian daerah
- 1) Menjaga stabilitas rantai pasok baik di saat pandemi covid-19 maupun tidak
 - 2) Stabilisasi harga dan pasokan untuk menjaga inflasi.
 - 3) Pengembangan pasar tradisional yang mampu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
 - 4) Pengembangan nilai ekspor komoditi unggulan DIY.
 - 5) Peningkatan daya saing produk melalui pengembangan inovasi produk.
 - 6) Regulasi pasar modern.
 - 7) Pengembangan dan pemberdayaan SDM serta kelembagaan Koperasi dan UKM (KUKM).
 - 8) Pengembangan lembaga keuangan dan skema pembiayaan bagi KUKM.
- c) Rekayasa perekonomian
- 1) Pemulihan Kegiatan perekonomian di sektor Pariwisata, penanaman modal, dan ekonomi kreatif akibat dampak pandemi Covid-19
 - 2) Peningkatan Kompetensi dan SDM Pelaku Usaha Pariwisata
 - 3) Memperkaya variasi kunjungan wisata (berbasis budaya, alam, desa wisata, dan lain-lain).
 - 4) Menyusun konektivitas antar destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata (*tourism transportation inline integrated*)
 - 5) Menyiapkan akses, atraksi dan fasilitas pendukung pariwisata.

- 6) Memperkuat kemitraan dengan komunitas pariwisata.
- 7) Pengembangan ekonomi kreatif.
- 8) Pengoptimalan peluang waktu tinggal kunjungan wisatawan di DIY.
- 9) Pengembangan inovasi produk pariwisata dan jenis produk pendukung pariwisata.
- 10) UU Ciptaker dan PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasca diterbitkan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja dan kemudian diikuti dengan diterbitkannya peraturan perundangan pelaksanaannya.
- 11) Ketersediaan lahan yang semakin sempit untuk proyek-proyek besar dan infrastruktur pendukung.
- 12) Kerjasama daerah dengan pihak Luar Negeri yang dapat meningkatkan perekonomian daerah (sister province, kerjasama teknik luar negeri, dan kerjasama dengan lembaga luar negeri)
- 13) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Pemda DIY.
- 14) Peningkatan promosi investasi secara terpadu.
- 15) Belum optimalnya fungsi harmonisasi hubungan industrial di DIY
- 16) Masih tingginya angka pengangguran terdidik dan belum link & match antara vokasi dan produktivitas (supply dan demand)
- 17) Perlunya perluasan kesempatan kerja sektor informal untuk pemenuhan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja DIY
- 18) Tidak seimbang jumlah kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja
- 19) Meningkatnya angka pengangguran terdidik
- 20) Perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas
- 21) Perlunya penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
- 22) Perlunya peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 tahun sesuai dengan periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY yaitu 2023-2026.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2023-2026, yaitu: ***Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.***

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Lebih lanjut Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2023-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Renstra tahun 2023-2026 merupakan landasan idiil-filosofis dan menjadi pedoman bagi penyelenggara Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta sebagai landasan pelaksanaan kegiatan yang diampu baik sektoral, lintas sektoral dan pendukungnya yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, agar mampu menjawab pesatnya tantangan perubahan lingkungan strategis dan pergeseran peradaban. Hal ini membawa implikasi perlu disusunnya Renstra 2023-2026 yang lebih progresif dan mampu mengakselerasi ke arah pencapaian Visi organisasi. Renstra 2023-2026 merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan dari Renstra 2017-2022, dimana tahun terakhir Renstra 2017-2022 akan menjadi tahun awal Renstra 2023-2026.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD DIY yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program, serta indikator sebagai tolok ukur kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang ditetapkan Pemerintah DIY dalam rangka mendukung pencapaian dari visi dan misi yang kemudian diamanatkan pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY adalah Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru.

Tabel 4- 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru	100%	100%	100%	100%

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan strategi dalam perencanaan pada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA menggunakan Metode Analisis SWOT atau disebut juga Metode Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategi yang merupakan asumsi-asumsi hasil analisis dan kemudian dapat digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan.

Metode Analisis SWOT memerlukan adanya masukan berupa Faktor Lingkungan Internal dan faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat obyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan analisis yang tidak memihak. Kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan internal Pemerintah Daerah DIY. Asumsi-asumsi tersebut merupakan dasar-dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis. Analisis SWOT terhadap faktor-faktor Internal dan Eksternal telah menghasilkan sejumlah asumsi sebagaimana tersebut dalam Matrik Analisis Lingkungan Strategis.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka dihasilkan pilihan strategis sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan dan tingkatkan peran serta aparat, SDA dan stakeholder yang cukup dan memadai untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Memanfaatkan penguasaan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 3) Mengembangkan dan tingkatkan kemanfaatannya ketersediaan data koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan untuk menunjang pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- 4) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;

- 5) Memanfaatkan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;

Melihat dari pilihan strategis yang, maka dapat ditentukan Faktor Kunci Keberhasilan dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY sebagai berikut :

- 1) Tersedianya aparat, SDA dan Stake holder yang cukup dan memadai untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 2) dikuasainya teknologi informasi untuk mendukung pengembangan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 3) Tersedianya data koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, perizinan dan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan untuk menunjang pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
- 5) Tersedianya anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selain faktor-faktor penentu keberhasilan, perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan sebagaimana berikut ini :

- 1) Belum memadainya kemampuan dan profesionalisme SDM/aparat untuk mengatasi perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali, pasar global/pasar bebas, perubahan iklim dan *global warming*;
- 2) Belum optimalnya koordinasi antar institusi yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pusat untuk mengantisipasi perubahan iklim, *global warming*, penyelundupan, produk sampah, pengangguran, kemiskinan dan eksploitasi SDA;
- 3) Belum ada regulasi/kebijakan yang memadai, implementatif dan konsisten untuk mengantisipasi pasar global/pasar bebas, perubahan iklim, *global warming*, tingkat pengangguran, kemiskinan dan eksploitasi SDA;
- 4) Belum ada *bisnis plan* bagi pengembangan kemitraan untuk masuk pasar global/pasar bebas;
- 5) Belum tersusunnya Sistem dan mekanisme pengawasan dan pengendalian kebijakan yang optimal untuk mencegah, mengatasi penyelundupan dan masuknya produk sampah;

- 6) Tidak terjalin koordinasi dan jejaring untuk menyongsong pasar global/pasar bebas, mengatasi perubahan iklim, *global warming*, pengangguran, kemiskinan dan mengatur dan mengendalikan eksploitasi SDA;
- 7) Belum adanya sistem dan prosedur birokrasi yang efisien efektif dan transparan untuk meraih pasar global/pasar bebas dan mengendalikan eksploitasi SDA;

Gambar 5- 1 Matrik Analisis Lingkungan Strategis

<p style="text-align: center;">ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</p>	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aparat, SDA dan Stake holder yang cukup dan memadai 2. dikuasainya teknologi informasi untuk mendukung pengembangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan 3. Tersedianya data bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi,, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; 5. Tersedianya anggaran yang cukup; 6. Adanya koordinasi antar instansi baik tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, maupun Pusat. 7. Tersedianya regulasi. 8. Wilayah DIY yang berada pada simpul kota bagian selatan. 9. Tersedianya Tenaga Kerja produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kemampuan dan profesionalisme SDM/aparat 2. Belum optimalnya koordinasi antar institusi yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pusat. 3. Regulasi/kebijakan yang belum memadai 4. Belum adanya <i>bisnis plan</i> bagi pengembangan kemitraan. 5. Belum optimalnya koordinasi dan jejaring
PELUANG	STRATEGI PELUANG + KEKUATAN	STRATEGI PELUANG + KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi; 2. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah; 3. Kerjasama/koordinasi antara Pemerintah, swasta dan PTN/PTS; 4. Peningkatan pengembangan penanaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aparat, SDA dan Stake holder yang cukup dan memadai untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi 2. dikuasainya teknologi informasi untuk mendukung pengembangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi 3. Tersedianya data bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan dan Profesionalisme SDM/aparat dengan perkembangan teknologi informasi 2. Optimalisasi koordinasi antar institusi yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pusat untuk menjalin kerja sama dengan swasta dan PTN/PTS; 3. Meningkatkan kemampuan dan kemitraan untuk meraih dukungan sektor usaha dan perbankan masyarakat bagi investasi 4. Menyiapkan <i>bisnis plan</i> bagi pengembangan kemitraan

<p>modal dan perijinan.</p> <p>5. Pangsa pasar potensial domestik dan luar negeri</p> <p>6. Dukungan sektor usaha dan perbankan masyarakat bagi investasi</p>	<p>pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan untuk menunjang pesatnya perkembangan teknologi informasi</p> <p>4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;</p> <p>5. Tersedianya anggaran yang cukup untuk memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah;</p>	<p>untuk meraih dukungan sektor usaha dan perbankan masyarakat bagi investasi</p> <p>5. Menyiapkan regulasi/kebijakan yang memadai, konsisten dan implementatif untuk mengambil peluang pangsa pasar potensial domestik dan luar negeri</p> <p>6. Penyediaan data potensi SDA untuk mendukung adanya peningkatan dan pengembangan penanaman modal dan perijinan.</p> <p>7. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.</p> <p>8. Menyiapkan regulasi untuk meraih investasi dari sektor dunia usaha dan perbankan.</p>
ANCAMAN	ANCAMAN + KEKUATAN	ANCAMAN + KELEMAHAN
<p>1. Globalisasi (Mordernisasi)</p> <p>2. Perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali</p> <p>3. Pasar global/pasar bebas (produk impor dan perilaku masyarakat)</p> <p>4. Perubahan iklim dan global warming</p> <p>5. Penyulundupan dan produk sampah</p> <p>6. Tingkat pengangguran dan kemiskinan.</p> <p>7. Eksploitasi SDA</p>	<p>1. Memfungsikan aparat, SDA dan Stake holder yang cukup dan memadai untuk mengatasi perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali</p> <p>2. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk mendukung pengembangan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan guna mengatasi Pasar global/pasar bebas</p> <p>3. Optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai guna mengatasi penyulundupan dan produk sampah</p> <p>4. Memanfaatkan anggaran yang cukup untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta pengendalian Eksploitasi SDA</p> <p>5. Optimalisasi fungsi regulasi untuk mengantisipasi perubahan iklim dan <i>global warming</i></p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM/aparat untuk mengatasi perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terkendali, Pasar global/pasar bebas, Perubahan iklim dan <i>global warming</i></p> <p>2. Optimalisasi koordinasi antar institusi yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pusat untuk mengantisipasi perubahan iklim, <i>global warming</i>, penyulundupan, produk sampah, pengangguran, kemiskinan dan Eksploitasi SDA</p> <p>3. Menciptakan Regulasi/kebijakan yang memadai, implementatif dan konsisten untuk mengantisipasi Pasar global/pasar bebas, Perubahan iklim, global warming, Tingkat pengangguran, kemiskinan dan Eksploitasi SDA</p> <p>4. Menyusun bisnis <i>business plan</i> bagi pengembangan kemitraan untuk masuk Pasar global/pasar bebas</p>

	<ol style="list-style-type: none">6. Optimalisasi posisi wilayah DIY yang berada pada simpul kota bagian selatan untuk menanggulangi penyulundupan dan produk sampah7. Memanfaatkan ketersediaan tenaga kerja produktif untuk meraih pasar global/pasar bebas8. Meningkatkan pemanfaatan TI untuk memasuki pasar global	<ol style="list-style-type: none">5. Menyusun sistem dan mekanisme pengawasan dan pengendalian kebijakan yang optimal untuk mencegah, mengatasi penyulundupan dan masuknya produk sampah6. Meningkatkan koordinasi dan jejaring untuk menyongsong Pasar global/pasar bebas, mengatasi Perubahan iklim, global warming, pengangguran, kemiskinan dan mengatur dan mengendalikan Eksploitasi SDA7. Menciptakan sistem dan prosedur birokrasi yang efisien efektif dan transparan untuk meraih pasar global/pasar bebas dan mengendalikan eksploitasi SDA
--	---	--

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan program yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah yang diampu oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam yaitu Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah, Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian, dan Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan.

Indikasi rencana program prioritas Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam berisi program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Tabel 5- 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Stabilitas Rantai Pasok Pangan dari hulu ke hilir 2. Menjaga kestabilan harga 3. Standarisasi produk melalui sertifikasi dan perlindungan HAKI bagi IKM 4. Peningkatan Sarana dan prasarana usaha pertanian dalam arti luas, industri, serta pariwisata 5. Perbaikan manajemen kelembagaan, penguasaan teknologi serta kemudahan akses permodalan dan akses pemasaran bagi UKM, termasuk di bidang pertanian 6. Peningkatan kompetensi SDM pelaku usaha perekonomian melalui standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan produktivitas 7. Menjadikan destinasi dan event berkelas dunia dengan dukungan regulasi, standar atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan layanan pendukung tingkat internasional yang terintegrasi di kawasan DTW prioritas 8. Kerjasama dan kemitraan usaha lintas sektor, lintas daerah, maupun lintas kewenangan dalam rangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Pusat Grosir Pangan 2. Pemberian Insentif/Stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha 3. Penumbuhan wirausaha baru dan IKM 4. Penumbuhan ketersediaan bahan baku 5. Penciptaan daya saing usaha 6. Penyusunan perencanaan strategis pengembangan Kawasan Ekonomi 7. Pengendalian stabilisasi harga 8. Perbaikan kelembagaan koperasi 9. Menumbuhkan kemampuan ekonomi inklusif melalui penumbuhan kewirausahaan baru dan peran UMKM 10. Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata DIY melalui Peningkatan fasilitas, pelayanan, daya tarik destinasi dan industri wisata melalui peningkatan promosi pariwisata 11. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 12. Perluasan kesempatan kerja di dalam dan di luar hubungan kerja 13. Perlindungan dengan pengaturan sistem pengupahan yang layak 14. Mendorong penciptaan dan pengembangan iklim investasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>peningkatan perekonomian</p> <p>9. Mendorong masuknya investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan baru</p> <p>10. Pengendalian pemanfaatan tataguna lahan khususnya pertanian</p> <p>11. Menciptakan wirausaha-wirausaha baru termasuk di sektor pertanian dalam arti luas yang berintegrasi dengan sektor lainnya sesuai dengan potensinya</p> <p>12. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan usaha</p>	<p>15. Dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi</p> <p>16. Daya tarik bidang pertanian bagi generasi muda</p> <p>17. Tata kelola dan pemanfaatan lahan yang efisien dan efektif, serta memperhitungkan keseimbangan antara fungsi sosial, ekonomi dan ekologi</p> <p>18. Pengenalan daya tarik usaha di sektor bahari bagi generasi muda</p> <p>19. Penerapan akses teknologi dan informasi di sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang produktifitas</p> <p>20. Kemitraan dengan nelayan yang lebih maju di daerah penyangga DIY</p> <p>21. Penerapan teknologi baru dan terbarukan</p> <p>22. Pemberian Insentif dan Fasilitasi Pelaku Usaha Parekraf</p>

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut.

Dengan merebaknya pandemi *coronavirus disease* (covid-19) berdampak pada perekonomian global dan nasional. Tentunya hal ini memerlukan kebijakan yang tepat dalam penanganan dampak perekonomian. Jika pandemi ini semakin berlarut-larut maka akan semakin mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 tumbuh minus sampai dengan -2,69% (*year on year*). Di DIY sendiri sektor perekonomian paling terdampak Covid-19 adalah sektor Pariwisata, Investasi, Tenaga Kerja dan Industri. Perlu adanya program kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi sebagai dampak covid19.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pendanaan indikatif merupakan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Untuk mewujudkan satu sasaran tahunan diperlukan minimal satu program. Program pada dasarnya merupakan suatu pernyataan sebagai wadah untuk kumpulan kegiatan yang sejenis dan erat terkait. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan misi pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Menghasilkan bahan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui percepatan berusaha, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan wilayah menuju masyarakat mandiri, adil, maju dan sejahtera.	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	90,50	6.545.740.690	90,60	6.196.034.444	90,70	6.291.709.715	90,80	6.440.997.470	90,80	25.474.482.319	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	100%	38.000.000	100%	44.000.000	100%	50.500.000	100%	57.000.000	100%	189.500.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	3 dokumen	30.000.000	3 dokumen	33.000.000	3 dokumen	36.500.000	4 dokumen	40.000.000	13 dokumen	139.500.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	N/A	4 dokumen	3.000.000	4 dokumen	4.000.000	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	6.000.000	16 dokumen	18.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD													
				Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	3 laporan	5.000.000	3 laporan	7.000.000	3 laporan	9.000.000	3 laporan	11.000.000	12 laporan	32.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan daerah	N/A	100%	5.513.140.690	100%	5.565.034.444	100%	5.621.709.715	100%	5.680.497.470	100%	22.380.382.319	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	41 orang/bulan	38 orang/bulan	5.471.140.690	36 orang/bulan	5.518.534.444	36 orang/bulan	5.570.709.715	36 orang/bulan	5.624.997.470	36 orang/bulan	22.185.382.319	Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				ASN	ASN													
				Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	37.500.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	42.500.000	4 dokumen	155.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1 laporan	3.000.000	1 laporan	4.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	6.000.000	4 laporan	18.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang jawab	Loka si
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD	N/A	3 laporan	4.000.000	3 laporan	5.000.000	3 laporan	6.000.000	3 laporan	7.000.000	12 laporan	22.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	N/A	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.000.000	100%	13.000.000	100%	46.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	N/A	1 laporan	10.000.000	1 laporan	11.000.000	1 laporan	12.000.000	1 laporan	13.000.000	4 laporan	46.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				pada SKPD	pada SKPD													
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	100%	291.000.000	100%	336.000.000	100%	381.000.000	100%	441.000.000	100%	1.449.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	1 paket	3.000.000	1 paket	3.500.000	1 paket	4.000.000	1 paket	4.500.000	4 paket	15.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	21 paket	25.000.000	21 paket	27.500.000	21 paket	30.000.000	21 paket	32.500.000	84 paket	115.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	16 paket	10.000.000	16 paket	12.000.000	16 paket	14.000.000	16 paket	16.000.000	64 paket	52.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	3 paket	23.000.000	3 paket	26.000.000	3 paket	29.000.000	3 paket	32.000.000	12 paket	110.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	N/A	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	12.000.000	5 dokumen	14.000.000	5 dokumen	16.000.000	20 dokumen	52.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	1 laporan	200.000.000	1 laporan	230.000.000	1 laporan	260.000.000	1 laporan	300.000.000	4 laporan	990.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	40.000.000	4 dokumen	115.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	100%	570.000.000	100%	100.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	830.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	N/A	1 unit	450.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	450.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	-	-	-	-	2 paket	40.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	N/A	7 unit	100.000.000	6 unit	80.000.000	6 unit	80.000.000	6 unit	80.000.000	25 unit	340.000.000	Biro APSDA Setda	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Lainnya	Disediakan												DIY	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	100%	7.600.000	100%	8.500.000	100%	9.500.000	100%	10.500.000	100%	36.100.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	1 laporan	4.000.000	1 laporan	4.500.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.500.000	4 laporan	19.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	1 laporan	3.600.000	1 laporan	4.000.000	1 laporan	4.500.000	1 laporan	5.000.000	4 laporan	17.100.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	N/A	100%	116.000.000	100%	131.500.000	100%	137.000.000	100%	159.000.000	100%	543.500.000	Biro APSDA Setda	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													DIY	
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	N/A	1 unit	25.000.000	1 unit	27.500.000	1 unit	30.000.000	1 unit	32.500.000	4 unit	115.000.000		Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	N/A	5 unit	65.000.000	5 unit	70.000.000	5 unit	75.000.000	5 unit	80.000.000	20 unit	290.000.000		Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Operasional atau Lapangan	Pajaknya													
				Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	-	-	10 unit	5.000.000	-	-	10 unit	7.500.000	20 unit	12.500.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	20 unit	20.000.000	20 unit	22.000.000	20 unit	24.000.000	20 unit	30.000.000	80 unit	96.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	N/A	8 unit	6.000.000	8 unit	7.000.000	8 unit	8.000.000	8 unit	9.000.000	32 unit	30.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan				Kategori Reformasi Birokrasi	BB	BB		BB		A		A		A		Biro APSDA Setda	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	ggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah				OPD													DIY	
				Program Perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100%	100%	2.794.693.000	100%	2.407.012.500	100%	3.024.967.500	100%	2.499.563.500	100%	10.726.236.500		Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	N/A	100%	1.794.693.000	100%	1.657.012.500	100%	1.874.967.500	100%	1.749.563.500	100%	7.076.236.500	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	5 dokumen	7 dokumen	1.361.161.500	6 dokumen	1.452.544.500	5 dokumen	1.164.796.500	5 dokumen	1.274.796.500	23 dokumen	5.253.299.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 dokumen	5 dokumen	433.531.500	2 dokumen	204.468.000	5 dokumen	710.171.000	5 dokumen	474.767.000	17 dokumen	1.822.937.500	Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Tercapainya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	N/A	100%	800.000.000	100%	550.000.000	100%	950.000.000	100%	550.000.000	100%	2.850.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 dokumen	5 dokumen	800.000.000	3 dokumen	550.000.000	3 dokumen	950.000.000	3 dokumen	550.000.000	14 dokumen	2.850.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha	N/A	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah													
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka	N/A	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	400.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					Usaha													
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	N/A	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	400.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pendukung perekonomian	100%	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	3.800.000.000	Biro APSDA Setda DIY	DIY
				Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan	N/A	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	3.800.000.000	Biro APSDA Setda	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Budaya	an Desa Budaya													DIY	
				Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	N/A	20	800.000.000	22	900.000.000	24	1.000.000.000	26	1.100.000.000	26	3.800.000.000		Biro APSDA Setda DIY	DIY

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Hal tersebut ditegaskan dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi pemerintah bertujuan:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan filosofis yang ingin dicapai, yakni menyejahterakan rakyat. Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah masih mengalami disharmoni karena masih adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan, terbatasnya payung hukum, serta tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan. Masalah lain, peraturan perundang-

undangan kementerian/sektoral belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada sisi lain, masih terdapat ego kedaerahan yang berlebihan sehingga koordinasi antar tingkat pemerintah dan antar daerah menjadi sulit dilaksanakan. Selain itu, fasilitasi kemitraan eksekutif dan legislatif serta penataan kelembagaan daerah, termasuk di dalamnya fasilitasi asosiasi daerah, juga masih belum dapat berjalan optimal.

Pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan oleh SKPD masih belum maksimal. Penerapan SPM dan IKU sampai saat ini belum optimal, tingginya kompleksitas dalam merancang dan menyusun indikator di dalam SPM dan IKU, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam upaya pencapaian SPM dan IKU, dan belum dilakukannya konsultasi publik dalam menentukan norma dan standar yang disepakati bersama dalam memberikan pelayanan publik sesuai SPM dan IKU.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Biro Administrasi Perekonomian dan SDA tahun 2023-2026 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi dari Pemda DIY yang diturunkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Adapun indikator kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan SDA tahun 2023-2026 dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

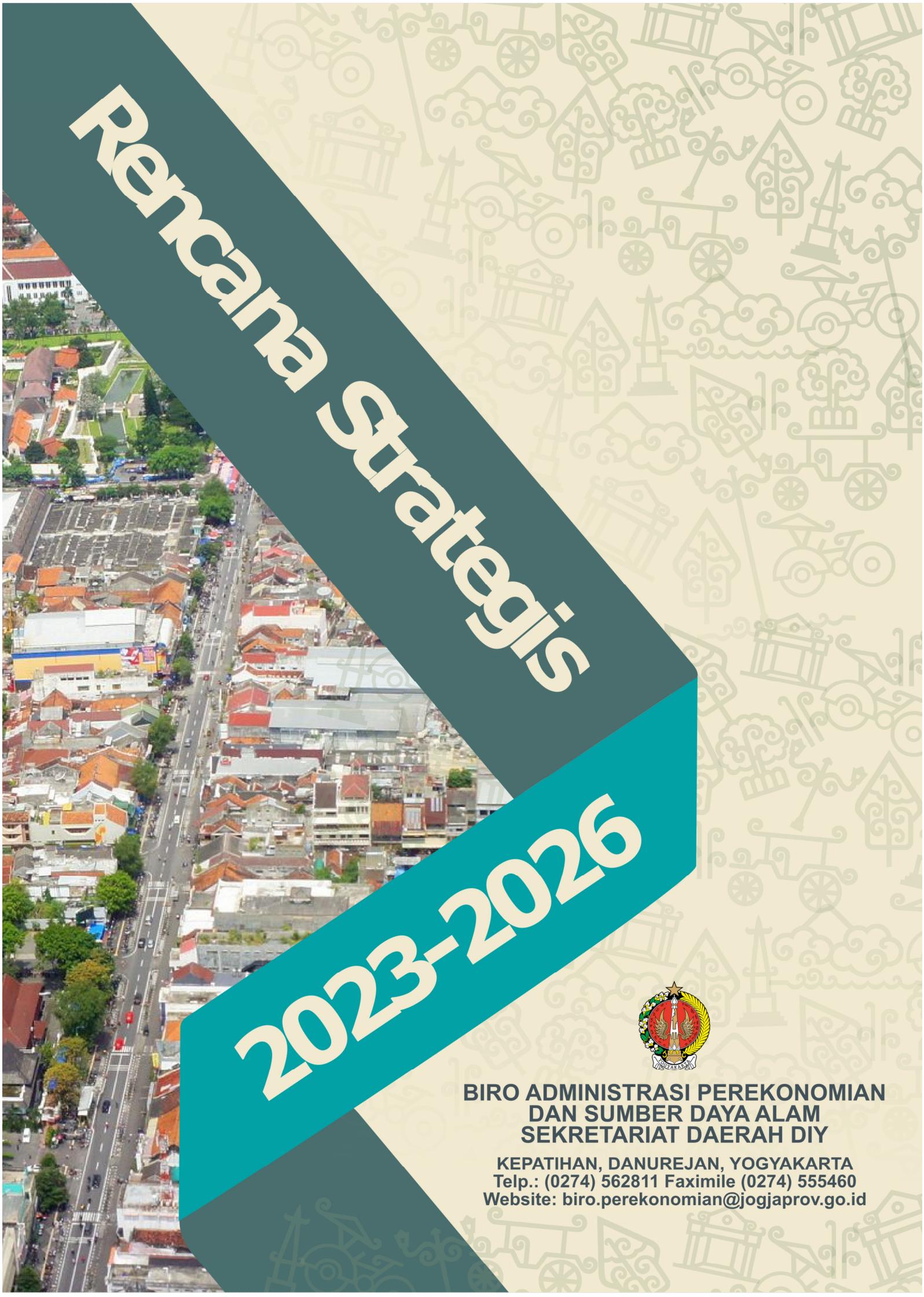
Tabel 7- 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (2022)	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)		
1.	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB 8 PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2023-2026 ini mengacu kepada RPD DIY Tahun 2023-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2023-2026 ini akan menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.



Rencana Strategis

2023-2026



**BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH DIY**

KEPATIHAN, DANUREJAN, YOGYAKARTA
Telp.: (0274) 562811 Faximile (0274) 555460
Website: biro.perekonomian@jogjaprov.go.id